



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jl. Jenderal Achmad Yani No.114

Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065

Web: pt-pontianak.go.id – Email: pengadilantinggipontianak@gmail.com

PONTIANAK 78124

Pontianak, 18 Juni 2020

Nomor : W17-U/1392/PL.07/6/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permintaan dokumen RKBMN TA 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Se- Kalimantan Barat
Di –

Tempat

Sehubungan surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 169/BUA.4/PL.07/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan usulan RKBMN melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sesuai maksud dan isi surat tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak

Drs. TAJUDIN NUR, S.H.
NIP. 19640608 198403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP: 3843348, 3810350, 3457661 FAX.3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10110

29 Mei 2020.

Nomor : 169/BUA.4/PL.07/05/2020
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Dokumen RKBMN T.A. 2022

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
4. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah DIPA 01.

Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-348/KN/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2022, dengan ini diminta kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk segera menyampaikan usulan RKBMN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:

1. Pengajuan RKBMN Perencanaan dilakukan melalui aplikasi SIMAN.
2. Satuan Kerja yang mengajukan Usulan Pengadaan dan Perluasan untuk Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.
3. Satuan kerja yang mengajukan Usulan Pemeliharaan untuk Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor harus melampirkan data dukung berupa foto BMN terbaru yang diunggah ke dalam aplikasi SIMAN pada menu Master Aset.
4. Pelaksanaan penyusunan RKBMN pada tahap Pengguna Barang dan Penelaahan RKBMN pada tahap Pengelola Barang dengan mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake*.
5. Dalam pengajuan RKBMN, operator SIMAK BMN dan SIMAN agar mengikuti petunjuk pengisian sebagaimana terlampir.

Mengingat pentingnya Pengajuan RKBMN sebagai dasar perencanaan diminta kepada Koordinator Wilayah untuk meneruskan surat ini kepada satuan kerja di wilayah hukumnya, memastikan bahwa data dukung yang diunggah adalah data terbaru serta menjamin ketepatan waktu pengajuan RKBMN Tahun Anggaran 2022. Pengajuan RKBMN Perencanaan melalui aplikasi SIMAN paling lambat tanggal **30 Juli 2020**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan,

Roslinda, S.H., M.H.
NIP. 19640612 198703 2 003

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran

PENJELASAN PENGISIAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, **RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan**.

- a. Ruang lingkup RKBMN untuk Pengadaan BMN, meliputi :
 - 1) Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah;
 - 2) Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara; dan
 - 3) Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (tidak termasuk kendaraan roda dua).
- b. Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN, meliputi:
 - 1) BMN berupa Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor.
 - 2) BMN selain Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap :
 - BMN yang berada dalam kondisi rusak berat.
 - BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan.
 - BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara.
 - BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain.
 - BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan.
 - BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah).

TATA CARA PENGISIAN RKBMN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

1. Pastikan *Plugin* yang ada diaplikasi SIMAN sudah menggunakan update terbaru yang dapat diunduh melalui website DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/siman-pengguna-barang>
2. Pastikan data aset yang ada di Aplikasi SIMAN sudah sinkron dengan data SIMAK BMN audited 2019.
3. Setelah login Aplikasi SIMAN, pilih menu Perencanaan, klik Permohonan Perencanaan, selanjutnya klik menu tambah untuk pengisian tahun anggaran 2022.



4. Menu perencanaan terbagi menjadi 4 sub menu, yaitu **Pengadaan, Pemeliharaan, Dokumen dan Notif Pemeliharaan**.
5. Untuk usulan pengadaan, harus dipastikan permohonan perencanaan pembangunan dan perluasan gedung kantor **di isi jumlah pimpinan dan pegawai** agar mendapatkan hasil maksimum SBSK bangunan.
6. Untuk usulan pemeliharaan, harus dipastikan bahwa data aset yang ada dalam aplikasi SIMAN pada **Master Aset sudah dilengkapi dengan foto BMN**, apabila belum dilengkapi **usulan pemeliharaan akan ditolak**. Oleh sebab itu, satker wajib melengkapinya.
7. Satker wajib meng-*upload* dokumen pada sub menu dokumen yang telah dibubuhkan stempel basah, yaitu :
 - RKBMN pengadaan.
 - RKBMN pemeliharaan.
 - Surat pengantar.
 - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) KPA/KPB bermaterai.
 - Berita Acara Konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat yang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPB dan berkop surat resmi untuk satker yang akan mengusulkan pembangunan dan perluasan gedung kantor dan rumah negara.
 - Nomor Tiket Usulan Pengajuan RKBMN dari aplikasi SIMAN.
8. Jika ada kendala, dapat menghubungi:
 - a. Wilayah Jawa dan Sumatera. David Ahmad Wijaya (0856-7148-884) dan Ulfah Apriani (0812-8615-1313).
 - b. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua. Devi Amelia (0813-6804-7776) dan Fidyanto Sandi S (0812-8949-6139).

Catatan:

*Semua dokumen data dukung usulan diunggah pada aplikasi SIMAN dan **Tidak Perlu** di kirim dalam bentuk *Hard copy* ke Biro Perlengkapan.

